



Efektivitas OK OCE sebagai Ekosistem Kewirausahaan Berbasis Komunitas dalam Pemberdayaan UMKM di DKI Jakarta

Muhammad Fahreza Ramadan¹, Raden Kenzy AlZhafari Gumilar², Syahlevi Raissa Airlangga³, Aniqotul Ummah⁴, Teddy Chrisprimanata Putra⁵

Political Science, UPN Veteran Jakarta, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: 2410413016@mahasiswa.upnvoj.ac.id, 2410413105@mahasiswa.upnvoj.ac.id, 2410413084@mahasiswa.upnvoj.ac.id, aniqotul.ummah@upnvoj.ac.id, teddycputra@upnvoj.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 24 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the OK OCE/Jakpreneur program as a community-based entrepreneurship ecosystem for empowering SMEs in DKI Jakarta. Three main questions guide this research: how the program is implemented on the ground, how the parties involved work together, and how well the SME community holds up under economic and urban political pressure. This research used a descriptive qualitative approach, collecting data through field observation, in-depth interviews with three informants the Chairman of OK OCE Indonesia, the head office secretary, and a partner SME actor in Rawamangun, East Jakarta along with visual documentation and secondary data. The analysis is grounded in urban politics perspective and the concept of community-based entrepreneurship. The findings show that OK OCE has grown beyond a simple training program into a social movement that connects SME actors with training, networks, and access to capital. One key finding is that the OK OCE curriculum was written into the Governor Regulation of DKI Jakarta Number 2 of 2020 meaning the government did not design the curriculum itself, but adopted what the community had already built. According to the key informant, the program has reached more than 400,000 active entrepreneurs in Jakarta since its launch in 2017. The capacity-building strategy covers three approaches: reskilling, upskilling, and new skilling, each adjusted to participants' starting point. That said, the research also found real problems that still exist on the ground many participants do not consistently apply what they learned, there is a clear digital literacy gap between older and younger business owners, and coordination between institutions is still often blocked by sectoral interests. This study concludes that empowering SMEs cannot rely on one-time training alone. What matters most is continuous, community-based mentoring carried out step by step starting from business legality, then capacity building, and finally strengthening market access and financing.

Keywords: OK OCE, Jakpreneur, SMEs, entrepreneurship ecosystem, community empowerment, urban politics, business digitalization, DKI Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis program OK OCE/Jakpreneur sebagai ekosistem kewirausahaan berbasis komunitas dalam memberdayakan UMKM di DKI Jakarta. Ada tiga

hal yang menjadi fokus utama: bagaimana program ini dijalankan di lapangan, bagaimana hubungan antar pihak yang terlibat, dan seberapa kuat komunitas UMKM bertahan di tengah tekanan ekonomi dan politik perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap tiga informan Ketua Umum OK OCE Indonesia, sekretaris kantor pusat, dan pelaku UMKM mitra di Rawamangun, Jakarta Timur serta dokumentasi visual dan data sekunder. Kerangka analisis yang digunakan adalah perspektif politik perkotaan dan konsep *community-based entrepreneurship*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OK OCE tidak hanya berjalan sebagai program pelatihan biasa, tetapi telah berkembang menjadi gerakan sosial yang menghubungkan pelaku UMKM dengan pelatihan, jaringan, dan akses modal. Salah satu pencapaian yang cukup penting adalah kurikulum OK OCE berhasil masuk ke dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 artinya bukan pemerintah yang merancang kurikulumnya, melainkan komunitas yang menawarkan dan kemudian diadopsi. Menurut keterangan narasumber, sejak diluncurkan tahun 2017 program ini telah menjangkau lebih dari 400.000 pelaku usaha aktif di Jakarta. Strategi peningkatan kapasitasnya mencakup tiga pendekatan: *reskilling*, *upskilling*, dan *new skilling*, yang disesuaikan dengan kemampuan awal masing-masing peserta. Meski begitu, penelitian ini juga menemukan beberapa masalah yang masih nyata di lapangan, seperti banyak peserta yang tidak konsisten menerapkan hasil pelatihan, adanya kesenjangan literasi digital antara pelaku usaha yang lebih tua dan yang lebih muda, serta koordinasi antarlembaga yang masih terhambat ego sektoral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak bisa hanya mengandalkan pelatihan sesaat. Yang paling menentukan adalah pendampingan yang terus-menerus berbasis komunitas, dijalankan secara bertahap mulai dari legalitas usaha, peningkatan kapasitas, hingga akses pasar dan pembiayaan.

Kata Kunci: OK OCE, *Jakpreneur*, UMKM, ekosistem kewirausahaan, pemberdayaan komunitas, politik perkotaan, digitalisasi usaha, DKI Jakarta

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dan politik perkotaan tidak dapat dilepaskan dari peran krusial Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai katup pengaman ekonomi lokal. Di wilayah seperti DKI Jakarta, tekanan sosio-ekonomi akibat urbanisasi, pengangguran, dan kemiskinan perkotaan yang mencapai 4,72% pada tahun 2021 Kusnandar, (2021) menempatkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif (Kusnandar, 2021; Wuisang et al., 2019). Lebih dari sekadar entitas bisnis, UMKM juga berperan sebagai aktor sosial-politik di tingkat akar rumput yang menjaga resiliensi ekonomi komunitas lokal di tengah dinamika pembangunan kota.

Namun demikian, pemberdayaan UMKM masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya inovasi dan daya saing di era digital (Ahdiat, 2022). Banyak pelaku usaha mikro juga tidak mampu memenuhi standar administratif perbankan formal, sehingga sulit memperoleh akses pembiayaan (Wieneke & Gries, 2011). Kondisi ini memperlebar kesenjangan ekonomi di wilayah urban, di mana

kapital lebih terkonsentrasi pada korporasi besar, sementara sektor informal kesulitan untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan penguatan ekosistem kewirausahaan yang melibatkan sinergi antara negara, pasar, dan masyarakat (Kholqi & Alfirdaus, 2020; Wulandari & Uno, 2021).

Sebagai respons, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan program OK OCE yang kemudian berkembang menjadi Jakpreneur melalui Pergub Nomor 2 Tahun 2020 (Kholisoh et al., 2024). Program ini dirancang untuk menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan berbasis kolaborasi dengan skema 7 PAS, mulai dari pelatihan hingga akses permodalan (Deviastri & Annisa, 2022). Meskipun menunjukkan dampak positif seperti peningkatan kapasitas manajerial dan legalitas usaha, program ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan jumlah pendamping dan kurangnya antusiasme wirausaha muda (Zahra & Sagita, 2023), serta masalah koordinasi antar lembaga (Wachid & Tuti, 2020). Oleh karena itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis OK OCE sebagai ekosistem kewirausahaan dalam perspektif politik perkotaan, khususnya dalam melihat relasi antara negara, pasar, dan masyarakat dalam tata kelola ekonomi lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program OK OCE/Jakpreneur dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta. Secara khusus, penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana peran program OK OCE/Jakpreneur dalam membentuk ekosistem kewirausahaan berbasis komunitas bagi pelaku UMKM di DKI Jakarta? (2) Bagaimana pola relasi dan kolaborasi antar-aktor (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat) dalam implementasi ekosistem kewirausahaan tersebut? dan (3) Bagaimana posisi dan resiliensi komunitas UMKM dalam menghadapi dinamika politik perkotaan (*urban politics*) serta ketimpangan ekonomi di wilayah Jakarta?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, tujuan dari kegiatan observasi lapangan ini adalah untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai implementasi program OK OCE sebagai ekosistem kewirausahaan berbasis komunitas. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan program di tingkat operasional, menganalisis pola interaksi antar-aktor yang terlibat, serta mengevaluasi sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM. Melalui observasi langsung, diharapkan diperoleh data faktual yang dapat memperkuat analisis dalam kerangka politik perkotaan, khususnya terkait relasi negara, pasar, dan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur angka atau menguji hipotesis, melainkan untuk memahami secara

mendalam fenomena sosial terkait implementasi program OK OCE/Jakpreneur sebagai ekosistem kewirausahaan di DKI Jakarta. Mengacu pada pandangan Sugiyono (2017), pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan ketika peneliti ingin mengkaji fenomena secara menyeluruh dan kontekstual, khususnya terkait pola relasi aktor dan dinamika politik perkotaan yang tidak dapat ditangkap sekadar melalui data statistik numerik (Sugiyono, 2017). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan langsung dari lapangan maupun dari ekosistem digital. Data primer diperoleh dari interaksi dan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian, yaitu pihak pengelola program di kantor pusat OK OCE yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan, serta para pelaku UMKM yang menjadi lokus penelitian di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui rekam jejak digital dan dokumentasi audiovisual yang relevan untuk mendukung dan memvalidasi temuan lapangan mengenai kegiatan serta program pemberdayaan yang dijalankan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat cara utama yang saling melengkapi. Pertama, observasi lapangan dilaksanakan di Rawamangun guna melihat secara langsung kondisi nyata, aktivitas, dan implementasi program pada komunitas UMKM. Kedua, wawancara mendalam dilakukan di kantor pusat OK OCE untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam dari pihak-pihak terkait perumusan dan pelaksanaan program. Ketiga, pengumpulan dokumentasi visual berupa rekaman video wawancara dan video aktivitas UMKM digunakan sebagai bukti empiris kondisi di lapangan. Keempat, penelusuran data daring (*online research*) dilakukan melalui media sosial, khususnya dengan menganalisis akun Instagram @okeoce.indonesia, sebagai sumber informasi tambahan mengenai dinamika, sosialisasi, dan program yang dipublikasikan kepada publik. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan interaktif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, seluruh data yang terkumpul dari hasil wawancara, catatan observasi, dokumentasi video, dan penelusuran media sosial diseleksi dan difokuskan pada informasi yang paling relevan dengan ketiga rumusan masalah. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi sistematis yang menggabungkan temuan operasional lapangan dengan kerangka konseptual politik perkotaan. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang tersaji untuk mengevaluasi efektivitas ekosistem OK OCE, memetakan pola relasi antar-aktor, serta menilai resiliensi komunitas UMKM di tengah dinamika ketimpangan ekonomi Jakarta (Sugiyono, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

OK OCE sebagai Gerakan Sosial Berbasis Kewirausahaan

Berdasarkan hasil wawancara, OK OCE dari awal memang tidak memposisikan dirinya sebagai program pemerintah. Rusyamsi menjelaskan bahwa OK OCE adalah gerakan sosial yang visi utamanya sederhana tapi ambisius: menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya melalui kewirausahaan. Caranya

bukan dengan menunggu perusahaan besar membuka lowongan, melainkan dengan mendorong setiap orang untuk membangun usahanya sendiri meski dimulai dari skala yang paling kecil sekalipun (I. Rusyamsi, komunikasi personal, 14 April 2026). Hal ini sejalan dengan visi resmi OK OCE yang tercatat dalam berbagai dokumen program, yakni menjadi gerakan sosial yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan kewirausahaan (Mardjono et al., 2022).

Jenis Usaha yang Diberdayakan oleh OK OCE

Salah satu hal yang cukup menonjol dari OK OCE adalah keterbukaan mereka terhadap jenis usaha yang bisa masuk ke dalam program. Rusyamsi menegaskan bahwa OK OCE tidak membatasi sektor usaha apapun siapapun dengan usaha apapun bisa bergabung (I. Rusyamsi, komunikasi personal, 14 April 2026). Dalam praktiknya, peserta datang dari berbagai latar belakang: ada yang bergerak di bidang kuliner dan makanan minuman, ada yang di fashion dan pakaian, ada juga yang di kerajinan tangan. Temuan ini diperkuat oleh data dari Mardjono et al., (2022) yang mencatat bahwa berdasarkan profil peserta pelatihan OK OCE, sebesar 55,6% bergerak di bidang fashion, 25,9% di bidang kuliner, dan sisanya di bidang kriya, kosmetik, pendidikan, serta perikanan (Mardjono et al., 2022).

Keterbukaan ini punya alasan yang masuk akal. Jakarta adalah kota dengan warga yang sangat beragam latar belakang dan keterampilannya. Dengan tidak membatasi jenis usaha, OK OCE bisa menjangkau lebih banyak orang seperti seorang ibu yang pandai memasak, pemuda yang tertarik di dunia fashion, atau pengrajin lokal sekalipun bisa masuk dan mendapat pendampingan yang sama. Wuisang et al. (2019) mencatat bahwa UMKM di Indonesia memang mencakup spektrum usaha yang sangat luas, dan justru keberagaman itulah yang membuat sektor ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal (Wuisang et al., 2019).

Kondisi Nyata UMKM di DKI Jakarta dalam Perspektif OK OCE

Berdasarkan temuan lapangan, program OK OCE telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2017. Rusyamsi menuturkan bahwa dalam tahun pertama pelaksanaannya saja, lebih dari 30.000 orang telah mendaftarkan diri ke pusat kewirausahaan di tingkat kecamatan, dan angka ini terus bertumbuh hingga saat ini mencapai lebih dari 400.000 masyarakat yang aktif menjalankan kewirausahaan di Jakarta (I. Rusyamsi, komunikasi personal, 14 April 2026). Angka ini cukup relevan jika diletakkan dalam konteks pertumbuhan UMKM DKI Jakarta secara keseluruhan, yang berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta menunjukkan kenaikan konsisten dari 1.336 unit pada tahun 2014 menjadi 4.058 unit pada tahun 2020, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2017 tahun yang sama dengan diluncurkannya program OK OCE (Sasono & Herlina, 2022).

Pertumbuhan ini tidak lepas dari keberhasilan OK OCE dalam mendorong kurikulumnya masuk ke dalam regulasi pemerintah daerah. Rusyamsi menjelaskan bahwa kurikulum 7 TOP berhasil diadopsi ke dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020, sehingga program ini memiliki landasan hukum yang lebih kuat (I. Rusyamsi, komunikasi personal, 14 April 2026). Proses ini menarik untuk dicermati karena menunjukkan bahwa OK OCE bukan sekadar menjalankan program yang diperintahkan pemerintah, melainkan sebaliknya mereka yang menawarkan kurikulum dan berhasil diadopsi oleh pemerintah. Pola relasi semacam ini mencerminkan apa yang tentang gambarkan sebagai sinergi antara negara dan masyarakat sipil, di mana inisiatif dari bawah justru mampu memberikan pengaruh terhadap kebijakan formal pemerintah daerah (Kholqi & Alfirdaus, 2020).

Dampak yang dihasilkan pun tidak berhenti pada jumlah peserta yang terus bertambah. Rusyamsi menjelaskan bahwa melalui pendampingan yang diberikan, peserta didorong untuk tidak hanya mendapatkan penghasilan sendiri, tetapi juga pada akhirnya mampu membuka lapangan kerja bagi orang lain di sekitarnya (I. Rusyamsi, komunikasi personal, 14 April 2026). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Wuisang et al. (2019) bahwa UMKM memiliki peran yang lebih luas dari sekadar entitas bisnis, yakni sebagai penyerap tenaga kerja yang penting di wilayah perkotaan (Wuisang et al., 2019).

Tantangan Kapasitas SDM dan Strategi Peningkatan Kompetensi UMKM

Di balik capaian positif tersebut, temuan lapangan juga mengungkapkan bahwa pelaku UMKM di Jakarta masih menghadapi tantangan yang cukup mendasar, terutama soal kapasitas sumber daya manusia. Rusyamsi menjelaskan bahwa pelatihan yang diberikan OK OCE dirancang untuk menyentuh dua sisi sekaligus, yakni pelatihan soft skill maupun hard skill, karena kelemahan pelaku UMKM memang tidak hanya soal keterampilan teknis semata (I. Rusyamsi, komunikasi personal, 14 April 2026). Kondisi ini juga diperparah oleh minimnya inovasi dan rendahnya adaptasi terhadap perkembangan digital, yang membuat banyak pelaku UMKM kesulitan bersaing di pasar yang semakin kompetitif (Ahdiat, 2022). Temuan ini diperkuat oleh Deviastri & Annisa (2022) yang dalam penelitiannya terhadap UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta menemukan bahwa banyak pelaku usaha masih menjalankan bisnisnya secara konvensional dan belum mampu memanfaatkan potensi yang mereka miliki untuk berinovasi, baik dari sisi produk, proses, maupun pelayanan (Deviastri & Annisa, 2022).

Untuk menjawab tantangan ini, OK OCE menerapkan strategi peningkatan kapasitas melalui tiga pilar. Pertama adalah reskilling, yaitu mengasah kembali keterampilan yang sudah dimiliki pelaku usaha agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Kedua adalah upskilling, yakni menambahkan kompetensi baru seperti pemasaran digital dan manajemen operasional. Ketiga adalah new skilling, yaitu memperkenalkan hal-hal yang benar-benar baru bagi peserta, khususnya yang berkaitan dengan teknologi dan digitalisasi usaha (I. Rusyamsi, komunikasi

personal, 14 April 2026). Wulandari & Uno, (2021) dalam penelitiannya terhadap peserta OK OCE di Jakarta menemukan bahwa pelatihan yang diberikan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, di mana setiap tambahan satu unit pelatihan berdampak pada peningkatan kinerja peserta sebesar 52,6% (Wulandari & Uno, 2021).

Kerangka tiga pilar ini menarik karena mencerminkan kesadaran bahwa peserta program OK OCE bukan kelompok yang homogen. Tidak semua pelaku UMKM datang dengan latar belakang dan kemampuan yang sama, ada yang sudah punya pengalaman usaha tapi butuh pembaruan, ada yang perlu tambahan skill tertentu, dan ada yang benar-benar mulai dari nol. Pendekatan diferensial seperti ini relevan dengan apa yang disampaikan Deviantri & Annisa, (2022) bahwa inovasi merupakan faktor yang paling signifikan dalam meningkatkan kinerja usaha UMKM di DKI Jakarta, sehingga intervensi pelatihan yang mendorong kemampuan berinovasi perlu menjadi prioritas utama dalam desain program pemberdayaan (Deviastri & Annisa, 2022).

Tantangan Digitalisasi dalam Pemberdayaan UMKM Lintas Generasi

Digitalisasi menjadi salah satu tantangan yang paling terasa dalam proses pemberdayaan UMKM di Jakarta, terutama bagi pelaku usaha dari generasi yang lebih tua. Berdasarkan keterangan Rusyamsi, sebelum pandemi COVID-19 hanya sekitar 8 juta dari 64 juta UMKM nasional yang sudah memanfaatkan teknologi digital. Angka ini naik cukup drastis menjadi lebih dari 24 juta pada tahun 2024, setelah berbagai pihak mulai aktif turun tangan memberikan pendampingan termasuk pemerintah, komunitas, dan kalangan akademisi (I. Rusyamsi, komunikasi personal, 14 April 2026). Gambaran ini juga konsisten dengan kondisi yang ditemukan Sasono & Herlina (2022) di tingkat lokal, di mana lebih dari sepertiga UMKM di Indonesia masih beroperasi secara offline dan kurang dari sepersepuluh yang benar-benar memanfaatkan e-commerce secara aktif (Sasono & Herlina, 2022).

Meskipun trennya positif, tantangan digitalisasi tidak hilang begitu saja. Rusyamsi mengakui bahwa pelaku usaha yang lebih tua cenderung kesulitan menyesuaikan diri dengan teknologi dibanding generasi muda yang memang sudah tumbuh di era digital (I. Rusyamsi, komunikasi personal, 14 April 2026). Kondisi ini bukan hal baru Ahdiat (2022) sudah mengidentifikasi rendahnya literasi teknologi sebagai salah satu kendala struktural terbesar yang dihadapi UMKM Indonesia dalam proses transformasi digital (Ahdiat, 2022). Yang lebih menarik, Fadhila & Hanri (2025) menemukan dalam studi kasus JakPreneur bahwa meski program sudah memberikan pelatihan pemasaran digital, sebagian besar peserta tidak benar-benar menerapkannya secara konsisten dan ini menjadi salah satu faktor yang membuat ketahanan pendapatan mereka lebih rendah dibanding kelompok yang tidak mengikuti program apapun. Artinya, masalahnya bukan hanya soal akses pelatihan, tapi soal sejauh mana peserta benar-benar mengubah perilaku usahanya setelah pelatihan selesai (Fadhila & Hanri, 2025).

Untuk menjawab tantangan ini, OK OCE tidak memukul rata pendekatannya. Pelatihan dirancang bertingkat, mulai dari yang paling sederhana seperti memanfaatkan WhatsApp dan media sosial untuk berjualan, hingga penggunaan e-commerce dan live streaming. Hasilnya pun terlihat nyata di lapangan. Rusyamsi menyebut bahwa ada laporan peningkatan omzet yang cukup signifikan dari anggota yang aktif menjalankan live streaming, di mana omzet bulanan mereka bisa melonjak dari jutaan menjadi puluhan hingga ratusan juta rupiah setelah mengikuti pendampingan (I. Rusyamsi, komunikasi personal, 14 April 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan digitalisasi sebenarnya bisa diatasi, asalkan pendampingan yang diberikan memang disesuaikan dengan kemampuan awal pelaku usaha dan dilakukan secara bertahap dan konsisten.

Strategi Keberlanjutan Usaha Peserta UMKM Pasca Pendampingan

Pertanyaan soal keberlanjutan selalu menjadi titik kritis dalam program pemberdayaan apa yang terjadi setelah pendampingan selesai? Rusyamsi menjelaskan bahwa OK OCE dari awal memang sengaja dirancang sebagai gerakan sosial, bukan program yang terikat pada anggaran pemerintah. Kata "gerakan" dipilih dengan pertimbangan matang agar program ini tidak berhenti ketika anggaran habis atau ketika kepemimpinan politik berganti (I. Rusyamsi, komunikasi personal, 14 April 2026).

Keberlanjutan ini dijaga lewat model komunitas yang mandiri. Alih-alih mengandalkan satu lembaga terpusat, OK OCE menggerakkan komunitas-komunitas lokal sebagai pendamping lapangan yang bekerja langsung di lingkungan terdekat pelaku usaha. Dengan pola ini, pendampingan bisa terus berjalan secara organik tanpa harus bergantung pada satu sumber daya atau satu otoritas tertentu (I. Rusyamsi, komunikasi personal, 14 April 2026). Wulandari & Uno (2021) menemukan bahwa variabel pendampingan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja UMKM dibandingkan variabel pelatihan saja, di mana setiap tambahan satu unit pendampingan berdampak pada peningkatan kinerja sebesar 61,9%. Ini menegaskan bahwa keberlanjutan pendampingan bukan sekadar pelengkap program, melainkan justru faktor paling menentukan keberhasilan jangka panjang (Wulandari & Uno, 2021).

Namun demikian, pendampingan yang berkelanjutan saja belum cukup kalau hasilnya tidak benar-benar diterapkan. Fadhila & Hanri, (2025) menemukan hal yang cukup mengejutkan dari studi kasus JakPreneur: peserta program ternyata lebih mampu mempertahankan jumlah tenaga kerjanya dibanding kelompok yang tidak mengikuti program apapun, tapi di sisi lain pendapatan mereka justru lebih rendah. Salah satu penyebabnya adalah banyak peserta yang tidak konsisten menerapkan pencatatan keuangan meski sudah mendapat pelatihannya. Temuan ini jadi pengingat bahwa program pemberdayaan yang baik harus diikuti dengan pemantauan penerapan secara berkala bukan sekadar memberikan materi lalu melepas peserta begitu saja (Fadhila & Hanri, 2025).

Selain soal pendampingan, keberlanjutan usaha juga sangat ditentukan oleh akses terhadap modal. Sebagai organisasi nirlaba, OK OCE tidak menyediakan modal secara langsung. Sebagai gantinya, mereka membangun kemitraan dengan lembaga keuangan baik perbankan konvensional maupun yang berbasis syariah di mana komunitas OK OCE berfungsi sebagai jembatan antara pelaku usaha dan institusi keuangan tersebut (I. Rusyamsi, komunikasi personal, 14 April 2026). Ini penting karena banyak pelaku UMKM yang sebenarnya sudah layak mengakses kredit, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kehadiran komunitas sebagai fasilitator membantu memperpendek jarak itu, sekaligus memperkuat ekosistem kewirausahaan yang lebih merata. Wachid & Tuti, (2020) mencatat bahwa salah satu faktor penghambat implementasi program OK OCE adalah ego sektoral antar lembaga yang terlibat, sehingga keberadaan komunitas sebagai penghubung lintas sektor menjadi semakin relevan untuk menjembatani celah koordinasi tersebut (Wachid & Tuti, 2020).

Masukan Dari Ketua OK OCE

Berdasarkan pengalaman OK OCE di lapangan, Rusyamsi menyampaikan dua rekomendasi utama yang ia nilai paling mendesak untuk diperbaiki dalam sistem pemberdayaan UMKM di Jakarta.

Rekomendasi pertama berkaitan dengan urutan dan struktur pembinaan. Rusyamsi menekankan bahwa pemerintah tidak boleh terburu-buru membawa pelaku UMKM ke tahap pemasaran sebelum urusan legalitas usaha mereka beres. Ia mencontohkan bahwa produk yang belum memiliki izin edar atau sertifikasi halal sebaiknya tidak dulu disebarluaskan secara luas, karena selain berisiko bagi konsumen, hal itu juga bisa merugikan pelaku usaha itu sendiri di kemudian hari (I. Rusyamsi, komunikasi personal, 14 April 2026). Dari sini terlihat bahwa masalahnya bukan hanya soal apa yang diajarkan, tapi soal kapan dan dalam urutan seperti apa. Pembinaan yang tidak terstruktur justru bisa menciptakan masalah baru. Karena itu, Rusyamsi menyarankan agar pemerintah menjalankan pembinaan secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan idealnya dilakukan secara rutin per minggu atau bahkan setiap hari, bukan dalam satu sesi besar yang tidak ada tindak lanjutnya.

Rekomendasi kedua menyangkut akses permodalan. Sebagai organisasi nirlaba, OK OCE tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan modal secara langsung kepada anggotanya. Karena itu, Rusyamsi mendorong agar pemerintah lebih serius mengoptimalkan kolaborasi dengan perbankan, khususnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan membangun mekanisme referral di mana komunitas pemberdaya seperti OK OCE bisa bertindak sebagai penghubung resmi antara pelaku UMKM yang sudah memenuhi kualifikasi dengan lembaga keuangan yang bersangkutan (I. Rusyamsi, komunikasi personal, 14 April 2026). Dengan mekanisme ini, proses pengajuan modal bisa lebih cepat dan lebih mudah karena ada pihak yang sudah mengenal rekam jejak pelaku usaha tersebut. Perlu dicatat bahwa pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk mendukung UMKM termasuk melalui subsidi bunga dan penjaminan

modal kerja namun tantangannya justru terletak pada bagaimana memastikan akses tersebut benar-benar sampai ke pelaku usaha paling bawah (Sasono & Herlina, 2022). Di sinilah komunitas seperti OK OCE bisa mengisi celah yang selama ini belum terjembatani, sekaligus membantu mengatasi masalah koordinasi antar lembaga yang selama ini masih menjadi hambatan nyata dalam implementasi program (Wachid & Tuti, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, program OK OCE/Jakpreneur memainkan peran krusial dalam membangun ekosistem kewirausahaan berbasis komunitas bagi UMKM di DKI Jakarta melalui kolaborasi strategis antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil. Program ini sukses bertindak sebagai mediator yang menjembatani kebutuhan akar rumput dengan kebijakan formal daerah, terbukti dari adopsi kurikulum 7 TOP oleh pemerintah. Keberhasilan pemberdayaan ini menegaskan bahwa ketahanan ekonomi UMKM tidak ditentukan oleh bantuan modal atau pelatihan sesaat, melainkan oleh pendampingan komunitas yang konsisten dan bertahap. Secara teoritis, temuan ini memperkuat perspektif politik perkotaan mengenai pentingnya *community-based entrepreneurship*, di mana komunitas berfungsi sebagai penghubung efektif yang tidak didominasi oleh negara maupun pasar, melainkan dikelola melalui interaksi kolaboratif. Meskipun UMKM menunjukkan resiliensi yang tinggi, efektivitas program masih dihadapkan pada tantangan koordinasi antarlembaga, kapasitas sumber daya manusia, dan adaptasi digitalisasi, terutama bagi pelaku usaha generasi tua. Untuk mengatasi hal ini dan meningkatkan keberhasilan program, diperlukan strategi *reskilling*, *upskilling*, dan *new skilling* yang tepat sasaran. Berdasarkan tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan komunitas memperkuat pembinaan berkelanjutan yang difokuskan secara bertahap dimulai dari legalitas usaha hingga perluasan pasar. Selain itu, pelatihan digital perlu disesuaikan dengan kapasitas usia peserta, kolaborasi untuk akses pembiayaan seperti KUR harus diperluas, dan evaluasi berkala perlu dirutinkan untuk memastikan materi pelatihan benar-benar diimplementasikan oleh para pelaku UMKM.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahdiat, A. (2022). *5 kendala terbesar UMKM Indonesia dalam melakukan transformasi digital*. Databoks Katadata.
- Deviastri, L., & Annisa, I. T. (2022). Peran Inovasi, Kolaborasi dan Media Sosial terhadap Kinerja Usaha UMKM di DKI Jakarta. *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 3(1), 52–63. <https://doi.org/10.33476/jobs.v3i1.2472>
- Fadhila, F. K., & Hanri, M. (2025). Efek Program Pendampingan UMKM terhadap P endampingan UMKM terhadap Performa Ketahanan P etahanan Pendapatan dan P endapatan dan Penyerapan Tenaga K enaga Kerja

- UMKM : erja UMKM : Studi kasus Program JakPreneur DKI Jakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 19(2), 75–95. <https://doi.org/10.7454/jke.v19i2.1149>
- Kholisoh, H., Priyadi, B. P., & Purnaweni, H. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM JAKPRENEUR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT. *Journal of Management and Public Policy*, 13(2), 1–20. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i2.43688>
- Kholqi, A., & Alfirdaus, L. K. (2020). Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(2), 141–150.
- Kusnandar, V. B. (2021). *Tingkat Kemiskinan Jakarta Capai Level Tertinggi dalam 20 Tahun Terakhir*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9be3b6f0ab182f1/tingkat-kemiskinan-jakarta-capai-level-tertinggi-dalam-20-tahun-terakhir>
- Mardjono, R., Narindro, L., Qamar, A. S., Sari, S., Maulana, A., & Jubaidah, I. (2022). Pemberdayaan UMKM Komunitas OK OCE Menggunakan Media Digital. *Abdimas Universal*, 4(1), 49–58. <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v4i1.190>
- Sasono, H., & Herlina. (2022). PERAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI PROVINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 86–94. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i1.623%0A>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D / Sugiyono*.
- Wachid, N., & Tuti, R. W. (2020). Quality Analysis of Service “One Kecamatan One Center of Entrepreneurship” (OK OCE) in East Jakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(3), 214–230. <https://doi.org/10.18196/jgpp.73135>
- Wuisang, J. R., Runtuwarouw, R., & Korompis, C. (2019). *Konsep Kewirausahaan Dan UMKM*. Yayasan Makaria Waya.
- Wulandari, R., & Uno, I. C. (2021). The Effect of The OKOCEProgram on Improving The Performance of The Micro, Small, and Medium Enterprises, in Jakarta. *PSYCHOLOGY AND EDUCATION*, 58(5), 1874–1885.
- Zahra, A. M., & Sagita, N. I. (2023). Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara. *NeoRespublica Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 260–274. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.157>